

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di RSUD Panembahan Senopati Bantul selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan RSUD Panembahan Senopati Bantul Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola RSUD Panembahan Senopati Bantul untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2019, adalah:

- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada RSUD Panembahan Senopati Bantul;
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan RSUD Panembahan Senopati Bantul sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;

- Menyediakan informasi mengenai bagaimana RSUD Panembahan Senopati Bantul sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- a Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- i Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- m Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan

keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja RBA.

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul, perubahan anggaran yang dilakukan pada RSUD Panembahan Senopati Bantul, realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja RSUD Panembahan Senopati Bantul.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja RSUD Panembahan Senopati Bantul, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan RSUD Panembahan Senopati, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada RSUD Panembahan Senopati Bantul.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA RBA

2.1 Ekonomi Makro

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2019 secara umum dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal; asumsi-asumsi; sasaran, indikator, target kinerja; dan pogram kerja yang akan dipergunakan untuk peningkatan pelayanan kepada pasien.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2019 juga dilaksanakan oleh RSUD Panembahan Senopati Bantul sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- Jumlah yang dianggarkan dalam RBA merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Belanja;
- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;
- Semua pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam RBA, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

RSUD Panembahan Senopati Bantul sebagai bagian fungsi Kesehatan Pemerintahan berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut:

- a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektifitas, dan transparansi dalam pelayanan masyarakat;
- b. Meningkatnya perbaikan kinerja birokrasi;
- c. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada *good governance* dan *clean government*;
- d. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat;
- e. Menurunnya berbagai temuan auditor pada pelaksanaan RBA Tahun 2018 dengan mengoptimalkan kinerja pembuatan laporan keuangan terkait;

- f. Meningkatnya tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak;
- g. Meningkatnya fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, dan pengawasan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pencapaian target kinerja keuangan pada RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Rencana Ketersediaan Dana

Ketersediaan Dana yang dikelola RSUD Panembahan Senopati Bantul adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah terdiri dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kesehatan, Dana Perimbangan (DAU, Dana Alokasi Khusus /DAK APBD Kabupaten Bantul) dan Surplus/SILPA Tahun 2018.

Rencana Ketersediaan Dana RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2019 sebesar Rp. 173.872.486.496,- sedangkan realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 195.492.433.635,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan BLUD Kesehatan	
1.1. Jasa Layanan	Rp. 130.003.444.347,-
1.2. Hasil kerjasama	Rp. 1.709.051.875,-
1.3. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	<u>Rp. 608.132.437,-</u>
Jumlah Pendapatan BLUD Kesehatan	Rp. 132.320.628.659,-
2. Pendapatan Dana Perimbangan	
2.1. Dana Alokasi Umum / Gaji PNS	Rp. 30.030.925.502,-
2.2. Dana Alokasi Khusus	Rp. 12.513.527.619,-
2.3. DBHCHT	Rp. 0,-
2.4. APBD II	<u>Rp. 10.751.109.376,-</u>
Jumlah Dana Perimbangan	Rp. 53.295.562.497,-
3. Surplus / SILPA Tahun 2018	Rp. 9.876.242.479,-

b. Belanja.

Secara garis besar komposisi anggaran belanja dalam RBA RSUD Panembahan Senopati Bantul adalah Belanja Operasional dan Belanja Modal.

Rencana Belanja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 183.749.328.975,- sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 180.012.821.760,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional	
1.1. Belanja Pegawai	Rp. 38.8754.906.048,-
1.2. Belanja Barang dan Jasa	<u>Rp. 121.934.638.950,-</u>
Jumlah Belanja Operasional	Rp. 160.689.544.998,-

2. Belanja Modal

2.1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	19.131.476.762,-
2.2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	0,-
2.3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	191.800.000,-
2.4.	Belanja Modal Aset Lainnya (ATB)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
	Jumlah Belanja Modal	Rp.	19.323.276.762,-

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

Target Pendapatan

Target pendapatan murni BLUD Kesehatan RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2019 sebesar Rp. 120.000.000.000,- yang berasal dari Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dari target tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 132.320.628.659,- atau sebesar 110,27 %.

Meskipun secara total keseluruhan realisasi pendapatan BLUD Tahun 2019 melebihi target yang ditetapkan, tetapi pada perjalanan pencapaian target pendapatan tersebut manajemen RSUD Panembahan Senopati Bantul harus membuat terobosan dengan mengajukan dana/kredit talangan kepada pihak perbankan PT. Bank Mandiri, Tbk dengan agunan berkas pengajuan klaim ke BPJS yang sudah diverifikasi (BA) setelah melaksanakan konsultasi dengan Pemda Kabupaten Bantul sebagai pemilik BLUD dan instansi terkait lainnya.

Usaha ini ditempuh karena adanya keterlambatan pembayaran klaim biaya perawatan dari BPJS, padahal pendapatan BLUD sebagian besar bersumber dari pembayaran klaim pasien jaminan BPJS.

Kesepakatan pengembalian dana talangan kepada Bank Mandiri, Tbk akan dibayarkan langsung melalui rekening escrow apabila klaim yang diajukan ke BPJS telah cair/likuid. Pengajuan dana talangan selama Tahun 2019 sebesar Rp. 7.000.000.000,- dengan rincian :

- Bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Bulan September 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Bulan Oktober 2019 sebesar Rp. 4.000.000.000,-

Seiring lancarnya pembayaran klaim oleh BPJS, pinjaman dana talangan kepada perbankan tersebut dapat dibayarkan pada periode tahun 2019.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan RSUD Panembahan Senopati Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Kas di Bendahara BLUD adalah kas dalam pengelolaan pemegang kas yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi pemerintah yang segera dapat dicairkan dalam jangka pendek, antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (duabelas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek dicatat/diukur sebesar nilai perolehan.

c. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas:

- Piutang Retribusi;

- Piutang Pendapatan;
- Piutang Lain-Lain.

Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada akhir periode akuntansi. Piutang Pajak akan diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapanannya (SKP/SKPT).

d. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*physical inventory taking*). Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh RBA melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah:

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya.
- Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk

operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

f. Aset Lainnya.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

1. Aset Tak Berwujud;
2. Tagihan Penjualan Angsuran;
3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi;
4. Kemitraan dengan pihak ketiga;
5. Sewa dibayar dimuka;
6. Lain-lain aset

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

g. Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

h. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
- Utang Jangka Pendek Lainnya.

i. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

j. Ekuitas

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah

k. Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang sudah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terutama menyangkut penilaian aset tetap serta penyusutan terhadap aset tetap.

BA B V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 100, Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi RBA, (b) Neraca; dan (c) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Realisasi RBA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh RSUD Panembahan Senopati Bantul pemerintah daerah yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan RBA dengan rencana yang tertuang dalam RBA.

Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, serta menghitung selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos pembiayaan. Struktur RBA Tahun Anggaran 2019 pada RSUD Panembahan Senopati Bantul meliputi komponen Pendapatan dan Belanja karena merupakan SKPD Penghasil Pendapatan. Alokasi Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

5.1. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS REALISASI RBA

5.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Rencana Pendapatan BLUD Kesehatan pada RSUD Panembahan Senopati Bantul yang tertuang dalam RBA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.120.000.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.132.320.628.659,- sebesar 110,27 % yang terdiri dari :

1. Pendapatan BLUD Kesehatan :	
1.1. Jasa Layanan	Rp. 130.003.444.347,-
1.2. Hasil Kerjasama	Rp. 1.709.051.875,-
1.3. Penerimaan Lain-lain yang Sah	<u>Rp. 698.132.437,- (+)</u>
Jumlah pendapatan BLUD Kesehatan	Rp. 132.320.628.659,-

5.1.2 Realisasi Belanja Daerah / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Rencana Belanja RSUD Panembahan Senopati Bantul yang tertuang dalam RBA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 183.749.328.975,- sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi Rp. 180.012.821.760,- atau sebesar 97,97 %.

Adapun perincian dari realisasi belanja daerah pada RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasional

Belanja operasional terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa, secara keseluruhan Anggaran Belanja Operasional Tahun 2019 sebesar Rp. 162.885.027.630,-

Realisasi belanja operasional sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 160.689.544.998,- dengan rincian sebagai berikut :

BELANJA PEGAWAI	40.021.226.296	38.754.906.048	96,84%
BELANJA BUNGA	400.000.000	-	0,00%
BELANJA BARANG	122.863.801.334	121.934.638.950	99,24%
JUMLAH	162.885.027.630	160.689.544.998	98,65%*

*) ada penjelasan lebih lanjut

2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli asset Pemerintah Kabupaten Bantul pada RSUD Panembahan Senopati Bantul guna peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan dengan anggaran sebesar Rp. 20.464.301.345,-

Realisasi Belanja Modal RSUD Panembahan Senopati Bantul sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 19.323.276.762,- atau sebesar 94,42 % dengan rincian sebagai berikut :

BELANJA MODAL	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA PERALATAN DAN MESIN	20.264.301.345	19.131.476.762	94,41%
BELANJA JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	200.000.000	191.800.000	95,90%
JUMLAH	20.464.301.345	19.323.276.762	94,42%

5.2. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 Aset Lancar

1) Kas di Bendahara BLUD

Penyajian Kas di Bendahara BLUD RSUD Panembahan Senopati Bantul pada Neraca per 31 Desember 2019 adalah Kas sebesar **Rp. 15.467.647.335,-** berbeda dengan saldo kas di Bendahara BLUD sebesar **Rp. 15.428.314.001,-** perincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Saldo Kas di Bendahara BLUD	Rp -	Rp -
2	Saldo Kas di BPD	Rp 876.473.468,00	Rp 1.558.202.919,00
3	Saldo Kas di Bank Bantul	Rp -	Rp -
4	Saldo Kas di Bank Mandiri	Rp 9.725.055.671,00	Rp 4.106.151.631,00
5	Saldo Kas di Bank BRI	Rp 4.765.579.851,00	Rp 1.669.300.478,00
6	Kas berjalan di BRI	Rp -	Rp 42.587.451,00
7	Deposito di BRI	Rp -	Rp 2.500.000.000,00
8	Saldo Kas Tunai	Rp -	Rp -
9	Hutang Pendapatan pada Jasa Raharja	Rp (5.280.200,00)	Rp -
10	Deposit in transit (Bank BPD)	Rp 66.485.211,00	Rp -
	JUMLAH	Rp 15.428.314.001,00	Rp 9.876.242.479,00

***) ada penjelasan lebih lanjut

2) Piutang Pendapatan / Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Pendapatan merupakan klaim atau hak yang dimiliki RSUD Panembahan Senopati Bantul yang diperoleh dari pelayanan terhadap pasien yang pada tanggal Neraca yang belum diterima secara kas/tunai. Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.19.209.561.161,-

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	PT. ASKES / BPJS KESEHATAN	-	-
	- Sosial	18.182.050.190,00	10.966.418.150,00
	- Komersial / In-Health	40.509.830,00	12.568.758,00
2	BAPEL JAMKESOS	-	-
3	JAMKESDA	-	1.139.480.175,00
4	JAMPERSAL DINKES KAB.BANTUL	-	83.606.100,00
5	PT. TASPEN	26.245.989,00	-
6	PT. MAESINDO	-	6.335.177,00
7	ASURANSI WANA ARTALIFE	12.045.138,00	12.045.138,00
8	ASURANSI PURI ASIH	17.979.733,00	17.979.733,00
9	UMMI KHASANAH	7.023.000,00	-
10	TUNGGAKAN PASIEN	780.897.281,00	786.764.894,00
11	RS UII	1.828.000,00	-
12	PT. JASA RAHARJA	-	150.342.689,00
13	JAVA PARKING	110.000.000,00	-
14	CV. TIMDIS	30.982.000,00	-
	JUMLAH	19.209.561.161,00	13.175.540.814,00

Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang RSUD Panembahan Senopati Bantul dihitung berdasar umur piutang (kategori II / umur 1-3 tahun, kategori III / umur 3-5 tahun, kategori IV / umur lebih dari 5 tahun) dan kriteria piutang (kurang lancar, tidak lancar dan macet) dengan rincian sebagai berikut :

**Penyisihan Piutang
RSUD Panembahan Senopati Bantul
Tahun 2019**

No	Kategori Piutang	Kriteria Piutang	Jumlah (Rp)
1	Kategori II (umur 1-3 tahun)	kurang lancar	18.554.591,00
2	Kategori III (umur 3-5 tahun)	tidak lancar	55.942.811,00
3	Kategori IV (umur > 5 tahun)	macet	583.399.351,00
	Jumlah		657.896.753,00

3) Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka RSUD Panembahan Senopari Bantul per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 26.000.000,00

4) Persediaan

Persediaan ini merupakan barang berwujud yang akan habis pakai atau terjual, namun saat tanggal neraca disusun masih belum terpakai atau terjual. Jumlah tersebut adalah persediaan barang habis pakai, persediaan bahan dan material serta persediaan barang lainnya yang masih tersisa sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 13.474.882.694,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
1	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor				
	1.1. Alat Tulis Kantor	Rp	19.771.500,-	Rp	34.927.100,-
	1.2. Kertas dan Cover	Rp	119.418.800,-	Rp	226.470.036,-
	1.3. Barang cetakan	Rp	0,-	Rp	0,-
	1.4. Benda Pos	Rp	24.753.500,-	Rp	15.744.400,-
	1.5. Bahan Komputer	Rp	6.702.750,-	Rp	6.036.150,-
	1.6. Perabot Kantor	Rp	6.939.000,-	Rp	9.416.500,-
	1.7. Alat Listrik dan Elektronik	Rp	56.761.350,-	Rp	106.947.000,-
	1.8. Peralatan Kebersihan	Rp	0,-	Rp	0,-
	1.9. Isi Tabung Gas	Rp	5.800.000,-	Rp	7.420.000,-
	1.10. Alat/bahan Kantor Lainnya	Rp	0,-	Rp	1.972.992,-
2	Persediaan Bahan/Material				
	2.1. Bahan Obat-obatan	Rp	13.175.697.557,-	Rp	7.697.253.229,-
3	Natura	Rp	59.038.237,-	Rp	156.858.819,-
	Jumlah	Rp	13.474.882.694,-	Rp	8.263.074.126

5.2.2. Aset Tetap

Aktiva Tetap merupakan aktiva (aset) berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan / 1 tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Jenis aktiva tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya setelah dilakukan penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian KIB/Aset Tetap	Saldo Akhir per 31 Des 2018	Mutasi		Saldo Akhir per 31 Des 2019
		Penambahan	Pengurangan	
Tanah	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00
Peralatan dan Mesin	193.596.571.789,24	19.006.058.707,00	(1.829.359.290,00)	210.773.271.206,24
Gedung dan Bangunan	56.380.470.856,00	-	-	56.380.470.856,00
Jalan, Irigasi & Jaringan	8.678.676.783,90	219.054.000,10	-	8.897.730.784,00
Aset Tetap Lainnya	22.256.394,00	-	-	22.256.394,00
Akum. Penyusutan AT	(115.607.420.288,73)			(149.346.528.024,27)
Jumlah	143.115.555.534,41	19.225.112.707,10	(1.829.359.290,00)	126.772.201.215,97

Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan metode garis lurus, akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 dihitung oleh Bidang Aset BKAD.

5.2.3. Aset Lainnya / Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud (aset lainnya) berupa aplikasi /system/perangkat lunak yang digunakan untuk kegiatan operasional yang menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Aset Tidak Berwujud (ATB) dihitung setelah dikurangi amortisasi. Akumulasi amortisasi ATB sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp (83.040.000).Jadi jumlah saldo Aset Tidak Berwujud per 31 DESEMBER 2019 sebesar RP 80.494.000

Uraian	Saldo Awal Thn 2018	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir Thn 2019
ATB	138.400.000,-	25.134.000,-	0,-	163.534.000,-
(Amortisasi)	(55.360.000,-)			(83.040.000)
Jumlah ATB	83.040.000,-	25.134.000,-	0,-	80.494.000,-

5.2.4. Kewajiban / Utang

Merupakan utang belanja yang harus dibayarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Jumlah utang per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 30.962.838.085,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Utang Pegawai Non PNS (Honor dan Tunjangan)	636.330.700,-	605.104.700,-
2	Utang Langganan Daya (Listrik, Telepon, Air)	209.536.339,-	168.355.322,-
3	Utang kepada Pihak Ketiga (obat, alkes, Habis Pakai, Pemeliharaan)	30.111.690.846,-	24.363.639.384,-
4	Utang Sewa Lahan	10.000.000,-	10.000.000,-
5	Utang kepada PT. Jasa Raharja	5.280.200,-	0,-
	Jumlah Total Utang	30.962.838.085,-	25.147.099.406,-

5.2.5. Ekuitas

Merupakan selisih antara Total Aset dikurangi Total Kewajiban sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 158.443.621.592,87 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Ekuitas Awal	150.468.023.659,41	128.039.486.327,20
Surplus (Defisit) – LO	(45.307.400.023,54)	(62.795.199.110,61)
R/K PPKD	53.282.997.957,-	85.223.736.442,82
Koreksi Nilai Persediaan	0,-	0,-
Selisih Evaluasi Aset Tetap	0,-	0,-
Lain-lain	0,-	85.223.736.442,82
Ekuitas Akhir	158.443.621.592,87	150.468.023.659,41

BAB VI
INFORMASI NON KEUANGAN

a. Bentuk Hukum Pemerintah Kabupaten Bantul.

RSUD Panembahan Senopati Bantul Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

b. Kegiatan operasional RSUD Panembahan Senopati Bantul Kabupaten Bantul antara lain mengacu pada:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.: 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
2. Peraturan Bupati Bantul No. 147 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No: 12 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan AP B D Perubahan Kabupaten Bantul
4. Peraturan Bupati Bantul No. : 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bantul Tahun 2019;
5. Peraturan Bupati Bantul No. 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Panembahan Senopati Bantul
6. Peraturan Bupati Bantul No. 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD Panembahan Senopati Bantul;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2019 , No. 914/083/DPPA/PPKD/2019 tanggal 8 November 2019;
8. Keputusan Direktur RSUD Panembahan Senopati Nomor : 64/XII Tahun 2011 tentang Sistem Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Panembahan Senopati Bantul.

c. Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat untuk Tahun 2019 RSUD Panembahan Senopati Bantul Kabupaten Bantul menjalin kerjasama dengan :

- (1).BPJS untuk pasien Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/POLRI,Tenaga Kerja dan Mandiri;
- (2).BP Jamkesos Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pasien peserta Jamkesos (Keluarga Rentan Miskin);
- (3).UPT Jamkesda Kabupaten Bantul untuk pasien peserta Jamkesos (Keluarga Rentan Miskin) wilayah Kabupaten Bantul;
- (4).Perusahaan Asuransi Lainnya dan Perusahaan yang menjalin kerjasama secara tertulis dengan RSUD Panembahan Senopati, Bantul (PG/PS Madukismo, PT Maesindo, PT. Taspen, Jasa Raharja, dll)

d. Kebijakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan dalam Penyajian Laporan Keuangan dibuat untuk memuat adanya pos-pos laporan keuangan yang memerlukan penjelasan-penjelasan lebih lanjut antara lain :

1. Penyajian Laporan Keuangan

Pada Tahun 2019 terjadi perubahan sistem pelaporan keuangan di Kabupaten Bantul, yang sebelumnya menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 berubah menjadi aplikasi SIMRAL sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap proses adaptasi dengan menggunakan aplikasi yang baru. Hasil Laporan Keuangan dengan menggunakan aplikasi SIMRAL terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas

2. Ketersediaan Dana / Pendapatan

Realisasi Ketersediaan Dana (Pendapatan) RSUD Panembahan Senopati Bantul yang dicatat oleh Subbag Perbendaharaan dan dilaporkan ke BKAD sebagai laporan konsolidasian jumlahnya tidak sama dengan print out Realisasi Pendapatan SIMRAL . Hal ini disebabkan karena pencatatan realisasi ketersediaan dana (pendapatan) oleh Subbag Perbendaharaan dengan memperhitungkan pendapatan BLUD Kesehatan (jasa layanan, hasil kerjasama dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah) dan Dana Perimbangan/ Dana yang berasal dari APBD (DAU,DAK dan APBD Tingkat II), sedangkan untuk pencatatan realisasi pendapatan melalui SIMRAL pendapatan hanya memperhitungkan pendapatan BLUD Kesehatan. Sehingga akan didapatkan komposisi masing-masing pendapatan sebagai berikut :

No	Uraian	Subbag Perbendaharaan dan Aset	Bidang Akuntansi (SIMRAL)
1	PAD yang sah :		
	1.1. Jasa Layanan	130.003.444.347	130.003.444.347
	1.2. Hasil Kerjasama	1.709.051.875	1.709.051.875
	1.3. Lain-lain pendapatan yg sah	608.132.437	608.132.437
	1.4. DAU/Gaji	30.030.925.502	
	1.5. DAK	12.513.527.619	
	1.6. APBD Tingkat II	10.751.109.376	
	Jumlah	185.616.191.156	132.320.628.659

3. Belanja Operasional

Realisasi Belanja Operasional (belanja pegawai) RSUD Panembahan Senopati Bantul oleh Subbag Perbendaharaan yang dilaporkan ke BKAD sebagai laporan konsolidasian jumlahnya tidak sama dengan print out SIMRAL. Selisih Belanja Operasional antara Subbag Perbendaharaan dan Aset dan aplikasi SIMRAL adalah sebesar Rp. 51.897.874,-

Hal ini disebabkan adanya penyesuaian (pengurangan) pajak penghasilan (PPh) pasal 21 gaji PNS selama tahun 2019 yang dilakukan oleh Bidang Akuntansi BKAD dengan cara menjurnal (mengurangi) PPh tersebut dan belanja bunga dari pinjaman dana/kredit talangan pada PT. Bank Mandiri, Tbk.

Anggaran Pembiayaan (untuk talangan/pinjaman) pada aplikasi SIMRAL hanya tersedia pada anggaran PPKD sedangkan, sehingga Laporan SP3B pada Bulan Agustus, September dan Oktober mengalami defisit (minus), hal ini disebabkan karena aliran kas masuk dan keluar yang berasal dari dana talangan tidak tercatat pada aplikasi SIMRAL yang dientry dari kegiatan OPD / RSUD Panembahan Senopati. Demikian juga untuk pembayaran bunga pinjaman dana talangan.

Laporan Realisasi Belanja Operasional (belanja pegawai) oleh Subbag Perbendaharaan dicatat sesuai dengan SP2D yang diterima dari BKAD / sebelum ada penyesuaian PPh Ps 21, sehingga komposisi belanja operasional adalah sebagai berikut :

No	Urian	Subbag Perbendaharaan	Bidang Akuntansi (SIMRAL)	Selisih
1	Belanja Operasional :			
	1.1. Belanja pegawai	38.767.470.588	38.754.906.048	12.564.540
	1.2. Belanja Bunga	39.333.334	-	39.333.334
	Jumlah	38.806.803.922	38.754.906.048	51.897.874

4. Surplus / (Defisit)

Perhitungan Surplus / (Defisit) sampai dengan 31 Desember 2019 oleh Subbag Perbendaharaan juga berbeda dengan print out SIMRAL, hal ini disebabkan pengakuan Surplus (Defisit) dengan mempertimbangkan total pendapatan yang diterima (termasuk Surplus Tahun 2018) dikurangi dengan total pengeluaran (belanja) maka hasil akhirnya adalah SURPLUS yang mencerminkan jumlah Kas yang ada di Bendahara BLUD sebesar Rp.15.428.314.001,- sedangkan pada SIMRAL Surplus/(Defisit) diakui hanya dari pendapatan murni BLUD dikurangi dengan total pengeluaran (belanja) maka hasil akhirnya adalah (DEFISIT) sebesar (Rp.47.692.193.101). Berikut ini komposisi perhitungan masing-masing Surplus/(Defisit) Tahun 2019 :

No	Uraian	Subbag Perbendaharaan	Bid. Akuntansi (SIMDA Keuangan)
1	PAD yang sah :	195.493.033.635	132.320.628.659
	1.1. Jasa Layanan	130.003.444.347	130.003.444.347
	1.2. Hasil Kerjasama	1.709.051.875	1.709.051.875
	1.3. Lain-lain pendapatan yg sah	608.132.437	608.132.437
	1.4. DAU/Gaji	30.030.925.502	-
	1.5. DAK	12.513.527.619	-
	1.6. APBD Tingkat II	10.751.109.376	-
2	Surplus Tahun 2018	9.876.842.479	
3	Belanja	180.064.719.634	180.012.821.760
	2.1. Belanja Operasional	160.741.442.872	160.689.544.998
	2.2. Belanja Modal	19.323.276.762	19.323.276.762
	Surplus/ (Defisit)	15.428.314.001	(47.692.193.101)

5. Kas di Bendahara BLUD

Penyajian Kas di Bendahara BLUD RSUD Panembahan Senopati Bantul pada Neraca per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 15.467.647.335,- sedangkan saldo kas di Bendahara BLUD sebesar Rp. 15.428.314.001,- sehingga diperoleh selisih kas sebesar Rp. 39.333.334,-

Hal ini disebabkan karena akun belanja bunga (akun 512) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- sebagai akibat dari adanya penerimaan pembiayaan dari bank Mandiri, Tbk penganggarnya ada PPKD, sedangkan pembayaran bunga pinjaman dana talangan sebesar Rp. 39.333.334,- dilakukan langsung oleh Bendahara BLUD tanpa ada SP2D dari Bagian Perbendaharaan BKAD, sehingga seakan-akan tidak ada realisasi pembayaran bunga tersebut.

6. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka adalah Biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban RSUD Panembahan Senopati untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi sudah membayarnya terlebih dahulu sebagai akibat adanya perjanjian/perikatan. Belanja Dibayar Dimuka RSUD Panembahan Senopati per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 26.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- Kegiatan Sewa dibayar dimuka atas sewa bangunan gudang kepada Sdr. Dewi Windyastuti, SH yang beralamat di Mantrigawen Lor 25/6 Yk RT/RW 023/007 Kelurahan Panembahan Kecamatan Kraton, Yogyakarta sesuai Surat Perjanjian No. : 445/4221/VIII/RSPS/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
Klausul perjanjian sewa bangunan gudang yang beralamat di Dusun Bantul Timur RT 06 Kelurahan Tlirenggo Kecamatan Bantul adalah sebagai berikut :
 - a. Sewa bangunan gudang dibayarkan tiap tahun sekali;
 - b. Waktu sewa selama 1 tahun;
 - c. Besar sewa bangunan gudang sebesar Rp. 39.000.000,- (=Tiga puluh sembilan juta rupiah=) terhitung mulai 1 September 2019 s.d. 31 Agustus 2020;
 - d. Pembayaran sewa lahan kepada Sdr. Dewi Windyastuti, SH dilaksanakan Pada Tahun 2019 sebesar Rp. 39.000.000,- dengan perincian sewa bangunan gudang Bulan September s.d. Desember 2019 sebesar Rp. 13.000.000,- sedangkan untuk beban dibayar dimuka untuk Bulan Januari-Agustus 2020 sebesar Rp. 26.000.000,-

7. Persediaan

Persediaan barang dicatat sesuai jenis-jenisnya yang terdiri dari : Barang Habis Pakai (isi tabung gas); Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : alat tulis kantor, kertas dan cover, benda pos, bahan computer, perabot kantor, alat listrik; Obat-obatan (farmasi); Natura dan Pakan : natura.

Pada tanggal 31 Desember 2019 juga dilaporkan Daftar Perbekalan Farmasi Expired Date (ED) sebagai berikut :

- a. Daftar Perbekalan Farmasi Expired Date (ED) Tahap I senilai Rp. 101.284.506,- dan telah dimusnahkan pada tanggal 28 November 2029;
- b. Daftar Perbekalan Farmasi Expired Date (ED) Tahap II senilai Rp. 13.265.490,- (jumlah tersebut tidak mempengaruhi Saldo Akhir Persediaan per 31 Desember 2019).

8. Aset Tetap, Aset Lainnya (ATB) dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

8.1. Aset Tetap

Mutasi Aset Tetap terdiri dari penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal dan pengurangan aset tetap yang berasal dari penghapusan aset tetap (peralatan dan mesin) selama Tahun 2019.

Mutasi tambah aset tetap selama Tahun 2019 sebesar Rp. 19.225.112.707,- terdiri dari penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp. 19.006.058.707 dan penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 219.054.000,- sedangkan mutasi kurang selama Tahun 2019 yang berasal dari penghapusan aset tetap peralatan dan mesin sebesar (Rp. 1.829.359.290,-)

8.2. Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud/ATB)

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 25.134.000,- yang berasal dari perencanaan belanja modal jalan, irigasi, jaringan Tahun 2018.

8.3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Akumulasi penyusutan aset tetap dan aset tak berwujud (amortisasi) yang diperhitungkan dengan metode garis lurus, sampai dengan akhir Tahun 2019 perhitungannya dilakukan oleh Bidang Aset BKAD.

Uraian	Saldo Akhir per 31 Des 2018	Penambahan		Pengurangan (Penghapusan)	Saldo Akhir per 31 Des 2019
		Belanja Modal	DED Thn 2018		
Aset Tetap :					
Tanah	45.000.000	-	-	-	45.000.000
Peralatan & Mesin	193.596.571.789,24	19.006.058.707	-	(1.829.359.290)	210.773.271.206,2
Gdng & Bangunan	56.380.470.856	-	-	-	56.380.470.856
Jalan,Irigasi & Jar.	8.678.676.784	191.800.000	27.254.000	-	8.897.730.784
Aset Tetap Lainnya	22.256.394	-	-	-	22.256.394
Akum.Penyusutan	(115.607.420.288,73)	-	-	-	(149.346.528.024,27)
Jumlah Aset Tetap	143.115.555.534,41	19.197.858.707	27.254.000	(1.829.359.290)	126.772.201.215,87
Aset Lainnya :					
Aset Tak Berwujud	138.400.000	-	25.134.000	-	163.534.000
Amortisasi	(55.360.000)	-	-	-	(55.360.000)
Jumlah Aset Tetap	83.040.000	-	25.134.000	-	108.174.000

7. Kewajiban / Utang Belanja

Kewajiban RSUD Panembahan Senopati Bantul terdiri dari utang beban kepada pegawai, utang beban kepada pihak ke-3, utang langganan daya dan jasa, utang sewa lahan, utang kepada Jasa Raharja dan utang belanja pembayaran bunga dana talangan.

Utang kepada pegawai adalah utang beban kepada pegawai / karyawan RSUD Panembahan Senopati Bantul berupa honor, tunjangan dan tambahan penghasilan kegiatan Bulan Desember 2019 yang diterimakan pada bulan Januari 2020 (berikutnya) sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Jumlah utang pegawai yang harus dibayarkan sebesar Rp. 636.330.700,-.

Utang Langganan Daya, Jasa adalah utang pembayaran rekening listrik, telepon dan air untuk penggunaan Bulan Desember 2019, karena slip/rekening pembayarannya baru terbit pada bulan Januari 2020. Jumlah utang langganan daya dan jasa yang harus dibayarkan sebesar Rp. 209.536.339,-.

Utang obat, alat kesehatan, alat kesehatan habis pakai, habis pakai kantor, jasa dan pemeliharaan adalah utang atas transaksi atas pengadaan barang dan jasa tersebut untuk memenuhi operasional rumah sakit selama 1 tahun yang dibuktikan dengan faktur/nota penjualan dari pihak ketiga/rekanan. Jumlah utang obat, alkes, alkes habis pakai, habis pakai kantor, jasa dan pemeliharaan yang harus dibayarkan sebesar Rp. 30.111.690.846,-. Mengingat besarnya jumlah utang yang harus dibayar dan untuk menjaga ketersediaan kas / arus kas maka untuk pembayarannya dibuat prioritas berdasarkan urgensi dan umur hutang, sehingga kegiatan operasional rumah sakit bisa berjalan lancar.

Utang kepada PT. Jasa Raharja terjadi karena kesalahan prosedur dari PT. Jasa Raharja dalam mentransfer biaya perawatan pasien kecelakaan lalulintas yang seharusnya ke rekening RSUD PKU Muhammadiyah Bantul, tetapi masuk/salah transfer ke rekening kas RSUD Panembahan Senopati Bantul sehingga pada Bulan Januari 2020 Bendahara BLUD RSUD Panembahan Senopati Bantul harus menyetor kembali ke rekening PT. Jasa Raharja sebesar Rp. 5.280.200,-.

Utang belanja bunga talangan/pinjaman ke PT. Bank Mandiri, Tbk muncul dari perikatan pinjaman dana talangan karena keterlambatan pembayaran klaim perawatan pasien oleh BPJS. Pinjaman dana talangan ini lazim disebut sebagai akun Pembiayaan BLUD. Anggaran pembiayaan ini dalam SIMRAL masuk ke akun PPKD, karena dalam tools SIMRAL OPD belum terakomodir, sehingga untuk realisasi anggaran harus menggunakan mekanisme penerbitan SP2D.

Bunga pinjaman sebesar Rp. 39.333.334,- sudah dibayar ke PT. Bank Mandiri, Tbk oleh bendahara pengeluaran, tetapi tidak melalui mekanisme pengajuan SPP dan SPM ke Bendahara Umum Daerah sehingga bunga pinjaman tersebut seakan-akan belum ada realisasi dan masih menjadi utang belanja.

BAB VI PENUTUP

Dari penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis Akual yang mengacu pada Sistem Aplikasi SIMRAL dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) RSUD Panembahan Senopati Bantul secara umum terdiri dari komponen Pendapatan, Belanja dan Surplus / (Defisit) dengan perincian sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan

Sistem Aplikasi SIMRAL mengakui Pendapatan RSUD Panembahan Senopati Bantul hanya mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pendapatan BLUD Kesehatan (Jasa Layanan). Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 132.320.628.659,- atau sebesar 110,27 %.

b. Realisasi Belanja

Sedangkan pengakuan Belanja RSUD Panembahan Senopati Bantul sesuai dengan Sistem Aplikasi SIMRAL terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Realisasi Belanja RSUD Panembahan Senopati sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 180.012.821.760,- atau sebesar 97,97 %.

c. Surplus / (Defisit)

Surplus / (Defisit) Tahun Berjalan RSUD Panembahan Senopati Bantul sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar (Rp. 47.692.193.101,-) yang merupakan selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA RSUD PANEMBAHAN SENOPATI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah	120.000.000.000	132.320.628.659	110,27
	1.1. Lain-lain PAD yang Sah	120.000.000.000	132.320.628.659	110,27
2	Belanja	183.749.328.975	180.012.821.760	97,97
	2.1. Belanja Operasi	163.285.027.630	160.689.544.998	98,41
	2.2. Belanja Modal	20.464.301.345	19.323.276.762	94,42
	Surplus/ (Defisit)	(63.749.328.975)	(47.692.193.101)	74,81

2. NERACA

Komponen Neraca sesuai dengan Sistem Aplikasi SIMRAL terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas dengan perincian sebagai berikut :

NERACA RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL

PER 31 DESEMBER 2019

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di BLUD	15.428.314.001,00	9.876.842.479,00
Piutang Pendapatan	19.209.561.161,00	13.175.540.814,00
Penyisihan Piutang	(657.896.753,00)	(630.904.468,00)
Beban Dibayar Dimuka	26.000.000,00	26.000.000,00
Persediaan	13.474.882.694,00	8.263.074.127,00
JUMLAH ASET LANCAR	47.480.861.103,00	30.710.552.952,00
ASET TETAP		
Tanah	45.000.000,00	45.000.000,00
Peralatan dan Mesin	210.773.271.206,28	193.596.571.789,24
Gedung dan Bangunan	56.380.470.856,00	56.380.470.856,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.897.730.784,00	8.678.676.784,00
Aset Tetap Lainnya	22.256.394,00	22.256.394,00
Akumulasi Penyusutan	(149.346.528.024,3)	(115.607.420.288,7)
JUMLAH ASET TETAP	126.772.201.216,01	143.115.555.534,51
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	163.534.000,00	138.400.000,00
Aset Lain-lain	-	-
Akumulasi Amortisasi ATB	(88.066.800,00)	(55.360.000,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	75.467.200,00	83.040.000,00
JUMLAH ASET	174.328.529.519,01	173.909.148.486,51
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak ketiga		
Utang Beban	30.962.838.085,00	25.147.099.406,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	30.962.838.085,00	25.147.099.406,00
EKUITAS	143.365.691.434,01	148.762.049.080,51
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	174.328.529.519,01	173.909.148.486,51

3. LAPORAN OPERASIONAL / LO

Komponen Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

LAPORAN OPERASIONAL RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

No	Uraian	Saldo Tahun 2019	Saldo Tahun 2018
1	PENDAPATAN	151.530.189.820,00	127.746.762.830,00
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
	Lain-lain PAD yang Sah	151.530.189.820,00	127.746.762.830,00
2	BEBAN OPERASI	196.837.589.843,54	190.611.655.691,61
	Beban Pegawai	38.786.132.048,00	35.237.184.548,00
	Beban Barang dan Jasa	124.213.317.642,00	122.867.350.125,00
	Beban Bunga	39.333.333,00	-
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	33.771.814.535,54	32.426.636.344,61
	Beban Penyisihan Piutang	26.992.285,00	80.484.674,00
	SURPLUS / (DEFISIT) DARI OPERASI	(45.307.400.023,54)	(62.864.892.861,61)
3	KEGIATAN NON OPERASIONAL		
	Surplus / (Defisit) Dari Non Operasional	-	-
	Surplus / (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(45.307.400.023,54)	(62.864.892.861,61)
4	POS LUAR BIASA		
	Surplus / (Defisit) Setelah Pos Luar Biasa	-	-
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(45.307.400.023,54)	(62.864.892.861,61)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS / LPE

Komponen Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/(Defisit), Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas Akhir.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Ekuitas Awal	150.468.023.659,41	128.039.486.327,20
2	Surplus/(Defisit)	(45.307.400.023,54)	(62.795.199.110,61)
3	R/K PPKD	53.282.997.957,00	85.223.736.442,82
	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
	Selisih Evaluasi Aset Tetap	-	-
	Lain-lain	-	85.223.736.442,82
	Ekuitas Akhir	158.443.621.592,87	150.468.023.659,41

Demikian Laporan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada RSUD Panembahan Senopati Bantul dan dijadikan sebagai laporan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Bantul, 31 Desember 2019

Pengguna Anggaran
RSUD Panembahan Senopati Bantul

dr. I WAYAN MARTHANA WK., Sp.THT.KL., M.Kes
NIP. 196702112006041006

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL
TAHUN 2018**



Piutang Pelayanan

Piutang Pelayanan merupakan klaim atau hak yang dimiliki RSUD Panembahan Senopati Bantul yang diperoleh dari pelayanan terhadap pasien yang pada tanggal Neraca belum diterima secara Kas sebesar Rp.11.261.992.378,-

No	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	PT. ASKES / BPJS KESEHATAN	-	-
	- Sosial	9,921,715,382.00	3,772,400.00
	- Komersial / In-Health	2,399,136.00	1,555,072.00
2	BAPEL JAMKESOS	-	170,800,625.00
3	JAMKESDA	382,391,604.00	-
4	JAMPERSAL DINKES KAB.BANTUL	135,487,700.00	-
5	PT. MADUBARU	-	8,565,654.00
6	PT. MAESINDO	7,568,325.00	3,848,160.00
7	ASURANSI WANA ARTALIFE	12,045,138.00	12,045,138.00
8	ASURANSI PURI ASIH	17,979,733.00	17,979,733.00
9	UMMI KHASANAH	-	426,000.00
10	TUNGGAKAN PASIEN	753,199,882.00	703,967,009.00
11	PT. Bank BRI (Persero) Tbk	-	24,500,000.00
12	PT. JASA RAHARJA	29,205,478.00	147,909,678.00
	JUMLAH	11,261,992,378.00	1,095,369,469.00

Kewajiban / Utang Beban

Pada tanggal 31 Desember 2016 terjadi pencatatan ganda/jurnal langganan daya dan jasa sebesar Rp. 144.997.058,- sehingga total Utang Beban yang tercatat di Neraca sebesar Rp. 6.090.925.791,-. Pada tanggal 2 Januari 2017 telah dilakukan jurnal koreksi terhadap akun tersebut, sehingga Saldo Awal Utang Beban yang seharusnya adalah sebesar Rp. 5.945.928.733,-.

Kewajiban RSUD Panembahan Senopati Bantul terdiri dari utang beban kepada pegawai, utang beban kepada pihak ke-3, utang langganan daya dan jasa sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 9.324.451.759,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS HUTANG	URAIAN	JUMLAH HUTANG
1	PEGAWAI		
	1.1. Honor Pegawai	Honor / gaji Pegawai Non PNS	402,299,500
		Honor Tenaga Rohaniawan	3,600,000
		Tunjangan Non PNS	1,450,000
		Jumlah	407,349,500
2	PIHAK KETIGA		
	2.1. Obat dan Farmasi	Pengadaan Obat dan Farmasi	3,287,693,591
	2.2. Alkes Habis Pakai	Pengadaan Alkes habis Pakai	3,251,542,085
	2.3. Investasi	Pengadaan Alat Kesehatan	659,434,448
	2.3. Habis pakai kantor,ATK	Pengadaan Alat Kesehatan	1,576,242,480
		Jumlah	8,774,912,604
3	LANGGANAN DAYA, JASA DAN SEWA		
	Langganan Listrik, Air, Telp		142,189,655
		JUMLAH TOTAL HUTANG	9,324,451,759